

**KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

(Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Diajukan Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



Oleh :

MARSHA AULIA FAUZA

NIM. 223010703015

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

PALANGKA RAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI
KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)

Disusun oleh :

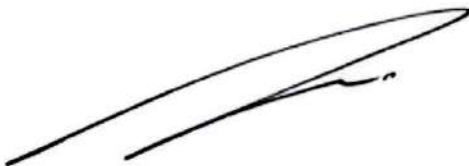
Marsha Aulia Fauza

NIM. 223010703015

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama



Bismar Harris Satriawan, S.IP. M.I.P.
NIP. 199403202022031016
Tanggal: 7 April 2026

Pembimbing Pendamping



Rizki Masyahbandi, S.Sos., M.IP
NIP. 198903182024061001
Tanggal: 15 April 2026

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh :

MARSHA AULIA FAUZA

NIM. 223010703015

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi

Pada Tanggal 18 Mei 2026

Tim Penguji :

Ketua Tim Penguji



Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P.
NIP. 199403202022031016

Tanggal: 18 Mei 2026

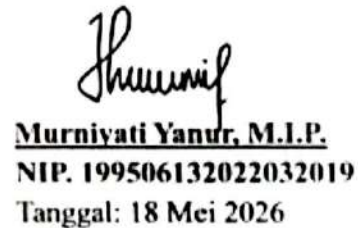
Sekretaris Tim Penguji



Rizki Masvabandi, S.Sos., M.I.P.
NIP. 198903182024061001

Tanggal: 18 Mei 2026

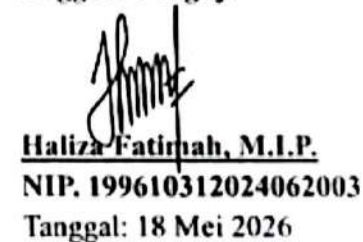
Anggota Penguji



Murniyati Yanur, M.I.P.
NIP. 199506132022032019

Tanggal: 18 Mei 2026

Anggota Penguji



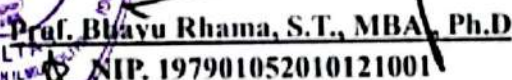
Haliza Fatimah, M.I.P.
NIP. 199610312024062003

Tanggal: 18 Mei 2026

Palangka Raya, 18 Mei 2026

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Palangka Raya



Prof. Blayu Rhama, S.T., MBA, Ph.D
NIP. 197901052010121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsha Aulia Fauza

Nim : 223010703015

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberikan tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Palangka Raya, 19 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Marsha Aulia Fauza

NIM. 223010703015

ABSTRAK

Marsha Aulia Fauza, NIM. 223010703015, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, 2026. “KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)”. Tim Pembimbing: Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. dan Rizki Masyahbandi, S.Sos., M.IP.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, implementasinya di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara satu badan publik dengan badan publik lainnya. Kondisi ini terlihat jelas di Kota Palangka Raya, di mana terdapat selisih nilai hingga 81,86 poin antara badan publik berpredikat Informatif dan Tidak Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketimpangan kinerja proaktif badan publik dalam penyediaan informasi publik di Kota Palangka Raya, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, serta studi dokumen. Analisis data mencakup penelaahan konsistensi antara data kinerja, temuan lapangan, dan kerangka regulasi yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kinerja proaktif terwujud dalam tiga dimensi, yaitu transparansi yang bersifat formalitas, akuntabilitas yang hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, dan responsivitas yang bersifat situasional. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh empat faktor dalam kerangka Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di antara keempat faktor tersebut, disposisi pimpinan terbukti paling menentukan karena secara langsung mengondisikan efektivitas faktor-faktor lainnya.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kinerja Proaktif, Implementasi Kebijakan, Edwards III.

ABSTRACT

Marsha Aulia Fauza, Student ID. 223010703015, Student of Government Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Palangka Raya, 2026. “PROACTIVE PERFORMANCE DISPARITY OF PUBLIC BODIES IN PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (An Analytical Study of Contributing Factors in Palangka Raya City)”. Supervisors: Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. and Rizki Masyahbandi, S.Sos., M.IP.

Public information disclosure is a fundamental pillar in realizing transparent and accountable governance. Despite being mandated under Law Number 14 of 2008, its implementation continues to reveal considerable disparities across public bodies. This is clearly evident in Palangka Raya City, where a gap of up to 81.86 points was recorded between the highest and lowest performing public bodies based on the 2024 Monitoring and Evaluation results of the Central Kalimantan Information Commission. This study aims to describe the forms of proactive performance disparity among public bodies in the provision of public information in Palangka Raya City, as well as to analyze the factors that contribute to the occurrence of such disparity.

This study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews with key informants, and document analysis. The analysis involved examining the consistency between performance data, field findings, and the applicable regulatory framework. The findings indicate that proactive performance disparities manifest across three dimensions, namely formality transparency, accountability limited to procedural compliance, and situational responsiveness. These disparities are influenced by four factors within Edwards III’s policy implementation framework, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Among these, leadership disposition proved to be the most decisive factor, as it directly conditions the effectiveness of the other three.

Keywords: Public Information Disclosure, Proactive Performance, Policy Implementation, Edwards III.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Analisis Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.

Penyusunan skripsi ini diselesaikan dengan kontribusi, bantuan, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang mendukung baik secara moril maupun materiil. Maka, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Salampak Dohong, MS selaku Rektor Universitas Palangka Raya, yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung selama penulis menempuh pendidikan Program Sarjana.
2. Bapak Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, atas segala dukungan dan kebijakan yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi dengan baik.

3. Bapak Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rizki Masyahbandi, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang dengan sabar memberikan masukan dan koreksi yang membantu penulis menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Jhon Retei Alfri Sandi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menjalani studi di Universitas Palangka Raya.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Sokip dan Ibu Mariana, yang dengan sabar selalu mendoakan dan mendukung langkah penulis. Doa dan kepercayaan kalian adalah bekal terbesar yang penulis bawa hingga titik ini.
7. Lalu Daffa Mirza Ferziyan, yang selalu ada di saat penulis membutuhkan dukungan. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusannya menemani proses panjang ini dari dekat.
8. Sahabat penulis, Aisyah dan Hanik Lathifah, yang telah membersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga detik-detik akhir penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala tawa, dukungan, dan kebersamaan yang tidak akan pernah terlupakan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan kebaikan atas segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan penulis, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Akhir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Palangka Raya, 1 April 2026

Penulis

Marsha Aulia Fauza

NIM. 223010703015

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Good Governance	11
2.1.1 Konsep Good Governance	11
2.1.2 Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsivitas dalam Good Governance.....	12
2.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan Edwards III	17
2.2.3 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Edwards III.....	18
2.2.4 Relevansi Teori Implementasi Kebijakan Edwards III dengan Penelitian	20
2.3 Keterbukaan Informasi Publik	21
2.3.1 Konsep dan Regulasi Keterbukaan Informasi Publik.....	21
2.3.2 Kewajiban Proaktif Badan Publik	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28

2.5 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	37
3.3 Waktu Penelitian	38
3.4 Fokus Penelitian.....	38
3.5 Sumber Data	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	52
4.1.2 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Palangka Raya	58
4.1.3 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.....	63
4.2 Hasil Penelitian	68
4.2.1 Bentuk Ketimpangan Kinerja Proaktif Badan Publik	68
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Kinerja Proaktif Badan Publik	91
BAB V PEMBAHASAN	118
5.1 Bentuk Ketimpangan Kinerja Proaktif Badan Publik	118
5.1.1 Transparansi	119
5.1.2 Akuntabilitas	125
5.1.3 Responsivitas	130
5.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Kinerja Proaktif Badan Publik ..	134
5.2.1 Faktor Komunikasi	135
5.2.2 Faktor Sumber Daya.....	138
5.2.3 Faktor Disposisi	143
5.2.4 Faktor Struktur Birokrasi.....	148
BAB VI PENUTUP	152
6.1 Kesimpulan.....	152
6.2 Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	159

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Darbishire, H. (2010). *Proactive transparency: The future of the right to information?* Washington, DC: World Bank.
- Dewi, D. S. K., & AP, M. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). *Teori kebijakan publik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. UNG Press.
- Rosidi, A., & Fajriani, A. (2013). *Reinventing goverment: Demokrasi dan reformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono, D. (2023). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.

2. JURNAL

- Alvioni, A. T., Miradhia, D., & Bonti, B. (2022). Keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 152-160.
- Ansyari, F., Alim, B. N., & Angreni, D. K. D. (2025). Penerapan prinsip good governance pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(3), 3431-3439.
- Arpiansyah, M., & Wibowo, N. E. (2024). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

- 2008 tentang keterbukaan informasi publik. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 776-791.
- Bangun, I. C., & Fauzan, I. (2023). Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam pemenuhan ketersediaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(1), 32-39.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Ferdaus, F., & Zaimasuri, Z. (2023). Implementation of public information disclosure policy in the House of Representatives of the Republic of Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies (JGAS)*, 3(1), 29-50.
- Muchsinin, M. (2025). Implementasi akses keterbukaan informasi publik era digital pada Perumdam Tirta Berkah Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 52-63.
- Paruntu, N. K., & Silalahi, W. (2025). Realisasi keterbukaan informasi publik pada lingkup Kementerian dalam menunjang pembaharuan sistem hukum nasional (PSHN). *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 1088-1106.
- Prasetya, H. A., & Subekti, T. (2025). Political will pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. *Journal of Governance and Policy*, 5(2), 215-233.
- Sukmadewi, Y. D., & Utama, K. W. (2022). Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan asas kemanfaatan. *Law, Development and Justice Review*, 5(1), 1-9.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi keterbukaan informasi publik pada situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209-218.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

3. WEB

ANTARA News Kalteng. 7 Oktober 2025. *Diskominfo Palangka Raya tingkatkan kapasitas PPID pelaksana*. Diakses pada 31 Agustus 2025, dari <https://kalteng.antaranews.com/berita/783085/diskominfo-palangka-raya-tingkatkan-kapasitas-ppid-pelaksana>

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. 2025. *Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025*. Palangka Raya: Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses pada 28 Januari 2026, dari dokumen internal Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Komisi Informasi Pusat. 2024. *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat. Diakses pada 29 Agustus 2025, dari <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20250617080821-Laporan%20Tahunan%202024%20Update%200032025.pdf>

MMC Kalteng. 5 Desember 2024. *DP3APPKB raih prestasi predikat informatif kategori badan publik*. Diakses pada 31 Agustus 2025, dari <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45749/dp3appkb-raih-prestasi-predikat-informatif-kategori-badan-publik>

4. UNDANG-UNDANG

Komisi Informasi Pusat. 2021. *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.